

## Pengaruh Pembangunan Daerah Melalui Community Development (Comdev) UPPKS Terhadap Kemiskinan Di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

Anita Maharani, Muhtar, HM Mudjib Musta'in  
Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Darul Ulum, Jombang  
Anita.maharani@gmail.com, muchtar.210959@gmail.com, gus.mmr@gmail.com

### ABSTRAK

*Community Development (comdev/pengembangan masyarakat)* adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan studi kasus. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dengan 13 Desa. Reknik sampel yang digunakan teknik Stratified Random Sampling berjumlah 108 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Field Research dan Library Research*. Data-data yang terkumpul dalam penelitian diperoleh dari kuesioner pembangunan daerah, kemiskinan dan Comdev UPPKS. berupa data interval Skala Likert. . Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian didapat bahwa ada pengaruh signifikan pada pembangunan daerah terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Akan tetapi tidak ada pengaruh yang signifikan Comdev UPPKS terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Tidak adanya pengaruh program Comdev UPPKS di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang adalah disebabkan oleh aspek peningkatan wawasan dan pengetahuan; aspek penerapan gaya kepemimpinan serta aspek pemberian bantuan modal dan minimnya bantuan ATTG (Alat Teknologi Tepat Guna) yang diterima.

Kata kunci: Pembangunan Daerah , Community Development (Comdev) UPPKS, Kemiskinan

### ABSTRACT

*Community Development (comdev/community development)* is an effort to develop a sustainable and active community condition based on the principles of social justice and mutual respect through the Efforts to Increase Prosperous Family Income (UPPKS). The approach in this research is descriptive, using case studies. The location of this research is Ngoro District, Jombang Regency with 13 villages. The sample technique used by the Stratified Random Sampling technique is 108 people. Data collection techniques used are *Field Research and Library Research*. The data collected in the study were obtained from the regional development, poverty and Comdev UPPKS questionnaire. in the form of Likert Scale interval data. . Data analysis was performed using multiple regression analysis.

The results of the study found that there was a significant influence on regional development on poverty alleviation efforts in Ngoro District, Jombang Regency. However, there is no significant effect of Comdev UPPKS on poverty alleviation in Ngoro District, Jombang Regency. The lack of influence of the UPPKS Comdev program in Ngoro District, Jombang Regency is caused by aspects of increasing insight and knowledge; aspects of implementing leadership styles as well as aspects of providing capital assistance and the lack of ATTG (Appropriate Technology Tools) assistance received.

Keywords: Regional Development, Community Development (Comdev) UPPKS, Poverty

### PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. Banyak dampak negatif yang dihasilkan dari kemiskinan, antara lain menimbulkan masalah sosial dan ekonomi (Saputra dalam Khadijah, dkk, 2017)

Tingkat kemiskinan dapat bersumber dari rendahnya tingkat pendidikan pekerja, rendahnya derajat kesehatan. Menurut Sumarsono (2009) investasi SDM sangat menentukan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi riil, bahkan krisis ekonomi memberi pengalaman bahwa negara yang mempunyai SDM yang baik akan lebih cepat keluar dari krisis ekonomi. Investasi sumber daya manusia yakni di bidang kesehatan dan pendidikan. Hal tersebutlah yang mendasari betapa pentingnya pembangunan manusia.

Negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi secara umum akan lebih mampu meningkatkan kualitas modal manusianya dibandingkan negara-negara miskin. Namun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa meskipun suatu negara mampu meningkatkan pendapatan per kapita tanpa harus memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan secara signifikan, tidak dapat dipastikan bahwa peningkatan

pendapatan per kapita tersebut akan di investasikan ke dalam pendidikan dan kesehatan anak-anak secara memadai (Todaro dan Smith, 2003).

Pada Sensus Penduduk Tahun 2016, dari 551.896 keluarga di Kabupaten Jombang terdapat penduduk pra sejahtera atau miskin sebanyak 71.421 keluarga atau 8% keluarga (BPS Kab. Jombang 2018).

Kecamatan Ngoro merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jombang dengan luas 49,86 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 65.587 jiwa, dan kepadatan 1.315 jiwa/km<sup>2</sup> dan terdiri dari 13 desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Jombang, keluarga pra sejahtera masyarakat Kecamatan Ngoro berjumlah 4.362 keluarga atau menduduki peringkat ke enam adanya kemiskinan di wilayah Kabupaten Jombang, dengan perincian klasifikasi keluarga sebagai berikut:

Tabel 1.  
Data Keluarga Pra Sejahtera di Kec. Ngoro

No	Desa	Pra Sejahtera	Sejahtera I	Sejahtera III	Jumlah
1	Jombok	108	246	955	1.309
2	Genukwatu	639	638	910	2.187
3	Rejoagung	242	479	1.309	2.030
4	Kauman	241	307	681	1.229
5	Ngoro	409	431	1.083	1.921
6	Badang	453	629	733	1.815
7	Pulorejo	251	301	1.174	1.726
8	Banyuarang	321	374	773	1.468
9	Sidowarek	451	482	959	1.892
10	Kesamben	321	347	249	1.317
11	Kertorejo	379	412	447	1.238
12	Gajah	229	407	824	1.460
13	Sugihwaras	321	412	427	1.160
	Jumlah	3.815	4.646	9.273	18.132

Sumber : PLK Kecamatan Ngoro, 2018

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yaitu dengan pembangunan yang berbasis pengembangan masyarakat atau dalam istilah lain disebut sebagai *community development* atau sering disingkat CD atau *Comdev*. Salah satu program *Comdev* adalah UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), program UPPKS sendiri dikelola oleh BKKBN. Di dalam pelaksanaannya program UPPKS yang juga merupakan salah satu program pemberdayaan keluarga yang sasaran utamanya adalah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I untuk itulah perlu diterapkan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang diharapkan dapat membantu anggota kelompok

Dwi Pratiwi Kurniawati dalam kajian tentang pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi menemukan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mojokerto khususnya pada sektor ekonomi yakni berupa bantuan individu dan bantuan kelembagaan belum sepenuhnya berhasil, dominasi dalam pelaksanaan oleh pihak pemerintah daerah membuat program tidak berjalan secara maksimal (Kurniawati, Supriyono, & Hanafi, 2013).

Sementara itu, Faizatul Karimah dalam kajiannya mengenai pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat menunjukkan secara administrasi dan fungsional pengelolaan alokasi dana desa dijalankan dengan baik, namun secara aplikatif terlihat belum sampai pada makna pemberdayaan masyarakat sesungguhnya (Karimah, Saleh, & Wanusmawatie, 2005).

Isnain Murdiansyah menunjukkan beberapa permasalahan dalam menjalankan program gerakan pendukung pengentasan kemiskinan Kabupaten Malang seperti kurangnya modal, adanya pemotongan dana, kredit yang macet, dominasi aparatur desa, dukungan infrastruktur desa yang masih rendah, dan juga koordinasi di antara pengelola program gerakan pendukung pengentasan kemiskinan di kabupaten belum maksimal (Amalia, dkk, 2014).

Program pembangunan daerah secara umum bertujuan meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat secara mandiri. Sedangkan tujuan khususnya di antaranya meningkatnya partisipasi seluruh masyarakatnya dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, serta akuntabel. Pengembangan masyarakat harus selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan mereka sendiri secara lebih berarti.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui pengaruh pembangunan daerah terhadap upaya pengentasan kemiskinan melalui program Comdev UPPKS di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

### METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan studi kasus. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dengan 13 Desa. Reknik sampel yang digunakan teknik Stratified Random Sampling berjumlah 108 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Field Research dan Library Research*. Data-data yang terkumpul dalam penelitian diperoleh dari kuesioner pembangunan daerah, kemiskinan dan Comdev UPPKS. berupa data interval Skala Likert. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### UUPKS Kecamatan Ngoro

Program UPPKS di Kabupaten Jombang telah ada sejak tahun 1992 namun dengan nama Takesra, Takukesra yang kemudian berubah menjadi UPPKA pada tahun 1994 dan pada tahun 2000-an berganti nama menjadi UPPKS. Program UPPKS memiliki dasar hukum UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Dan terdapat Peraturan Kepala BKKBN Nomor 15/HK.010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

UPPKS di Kabupaten Jombang dikelola dan dikoordinasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan mitra kerja perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. UPPKS dikelola dalam Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Setiap kecamatan di Kabupaten Jombang memiliki kelompok UPPKS.

Kecamatan Ngoro dengan luas wilayah 4.986 km<sup>2</sup> memiliki jumlah penduduk 37.044 jiwa. Jumlah peserta KB pada Kecamatan Ngoro pada tahun 2018 sebanyak 11.609 jiwa dari total 14.444 Pasangan Usia Subur (PUS). Kecamatan Ngoro memiliki 7 (tujuh) Kelompok UPPKS yakni Ngoro, Kauman, Rejoagung, Kesamben, Banyuarang, Pulorejo, Jombok.

Pada awalnya pada tahun 2009 semua desa pada kecamatan Ngoro diberikan modal untuk kegiatan UPPKS dari BKKBN. Modal awal UPPK di Kecamatan Ngoro sebesar Rp. 500.000. Akan tetapi dari 13 desa di Kecamatan Ngoro hanya 7 desa yang masih aktif dan efektif melakukan kegiatan UPPKS yaitu desa Ngoro, Kauman, Rejoagung, Kesamben, Banyuarang, Pulorejo, Jombok.

Bentuk kegiatan UPPKS di tiap desa di Kecamatan Ngoro diberlakukan model simpan pinjam berkelanjutan, yaitu anggota memiliki hak untuk meminjam hanya satu kali dalam satu tahun dengan pengembalian 2 bulan, yang kemudian di berikan kepada anggota yang lain. Peminjaman modal dapat dilakukan hanya untuk keperluan usaha diantaranya warung kelontong, pembuatan kripik/kue, menjahit yaitu sebesar Rp. 250.000,-. Pada satu desa biasanya terdapat 10 – 25 anggota tergantung pada modal yang tersedia pada UUPKS Desa.

#### Deskripsi Analisis Hasil

##### Uji Normalitas

Dalam uji normalitas, penulis menggunakan hasil uji dari kolmogorof-smirnov test dengan model dihasilkan sebagai berikut :

Tabel 2  
Uji Normalitas secara menyeluruh  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Kemiskinan	Pemb_Daerah	Comdev_UPP KS
N		104	104	104
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	6,0672	1,63	52,04
	Std. Deviation	,27093	,079	4,538
Most Extreme Differences	Absolute	,105	,104	,100
	Positive	,105	,101	,061
	Negative	-,105	-,104	-,100
Kolmogorov-Smirnov Z		1,666	1,645	1,581
Asymp. Sig. (2-tailed)		,008	,009	,014

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada kolom variabel kemiskinan, pembangunan daerah dan Comdev UPPKS secara berurutan terdapat nilai kolmogorov-smirnov 1,666, 1,645 dan 1581 dengan nilai probabilitas 0,08; 0,0,09; 0,14 Asym. Sig. (2-tailed). Persyaratan data disebut normal jika probabilitas atau  $p < 0,05$  (lebih besar) pada uji normalitas dengan kolmogorov smirnov. Oleh karena nilai  $p = 0,08; 0,0,09; 0,14$  atau  $p < 0,05$ , maka diketahui bahwa data variabel pelayanan publik, budaya organisasi dan kinerja pegawai adalah normal.

### Uji Multikolinearitas

Tabel 3  
Hasil Uji Multikolinearitas  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4,298	,299		14,397	,000		
Pem_Daerah	,033	,004	,550	9,200	,000	,781	1,280
Comdev_UPPKS	,037	,205	,011	,181	,856	,781	1,280

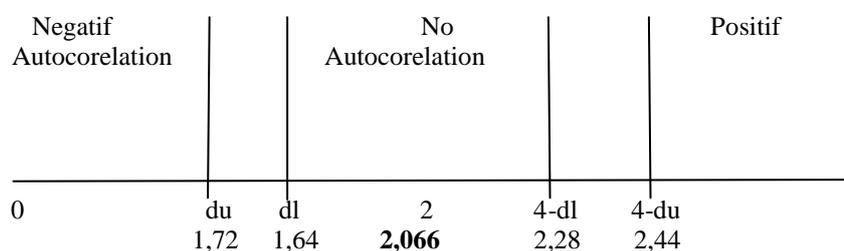
a. Dependent Variable: kemiskinan

Dilihat dari nilai VIF yang dimiliki kedua variabel yaitu kinerja pegawai dan budaya organisasi, keduanya memiliki Nilai VIF kurang dari 10, yaitu 1,28, sehingga variabel pembangunan daerah dan Comdev UPPKS dapat disimpulkan tidak terjadi gejala Multikolinearitas.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi atau tidak. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Jika nilai Durbin Watson hitung mendekati atau di sekitar angka 2 maka model terbebas dari asumsi klasik autokorelasi. Batas atas yang digunakan adalah 4-dl dan batas bawahnya 4-du. Dari hasil tabel dengan  $n=104$  dan  $k=2$  diperoleh nilai  $du=1,72$  dan  $dl= 1,64$ . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4  
Hasil Uji Autokorelasi



Berdasarkan uji di atas tampak bahwa Durbin Watson hitung sebesar 2,066 terletak di daerah no autocorelation sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda terbebas dari asumsi statistik autokorelasi.

### Uji Validitas dan realibitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 104 orang, maka nilai  $r$  table dapat diperoleh melalui  $df = n-k$  dimana  $k$  merupakan jumlah butir pertanyaan dalam suatu variabel. Jadi  $df=104-3= 101$ , maka  $r$  table = 0,223. Butir pertanyaan dikatakan valid jika  $r$  hitung (0,985) yang merupakan nilai dari *corrected item*, - total correlation >  $r$  tabel.

## Analisis Hipotesa Regresi

Tabel 5

Model Summary										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,555	,308	,302	,22629	,308	55,179	2	104	,000	

Tabel model summary di atas menunjukkan bahwa nilai R yang merupakan simbol dari nilai koefisien korelasi adalah 0,555. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian ada di kategori sedang. Melalui tabel ini juga diperoleh nilai R Square atau koefisien determinasi (KD) yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai KD yang diperoleh adalah 30,2% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel bebas Pembangunan Daerah (X1) dan Comdev UPPKS (X2) memiliki pengaruh kontribusi sebesar 43% terhadap variabel Kemiskinan dan 57% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel Pembangunan Daerah (X1) dan Comdev UPPKS (X2), sebagaimana pada Anova pada Tabel 5.19.

Tabel 6  
ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,651	2	2,826	55,179	,000 <sup>a</sup>
	Residual	12,700	248	,051		
	Total	18,351	250			

a. Predictors: (Constant), Pemb\_daerah, Comdev\_UPPKS

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Tabel Anova di atas menentukan taraf signifikansi atau linieritas dari sebuah regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji F atau uji nilai Signifikansi (Sig.). Jika Nilai Sig. < 0,05, maka model regresi adalah linier, dan berlaku sebaliknya. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Sig. = 0,00 yang berarti > kriteria signifikan (0,05), dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan artinya, model regresi linier sudah memenuhi kriteria linieritas. Dengan demikian terjadi pengaruh yang signifikan antara pembangunan daerah terhadap kemiskinan dan Comdev terhadap kemiskinan.

Tabel 7

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4,298	,299		14,397	,000		
Pemb_daerah	,033	,004	,550	9,200	,000	,781	1,280
Comdev_UPPKS	,037	,205	,011	,181	,856	,781	1,280

a. Dependent Variable: kemiskinan

Maka berdasarkan tabel 5,20 untuk hipotesis yang diajukan, maka untuk variabel X1 (pembangunan daerah) adalah,  $0,000 < \text{probabilitas } 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama di terima. Sedangkan pada variabel X2 (Comdev UPPKS) adalah  $0,856 > \text{probabilitas } 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa H2 atau hipotesis kedua di tolak yang artinya tidak ada pengaruh Comdev UPPKS terhadap kemiskinan di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

Tabel coefficient diatas menginformasikan model persamaan regresi yang diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada di kolom *Unstandardized Coefficients B* tersebut maka dapat dituliskan bahwa persamaan regresi berganda yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = 4,298 + 0,33 X_1 + 0,37 X_2$$

Persamaan di atas mengandung arti sebagai berikut:

Konstanta atau  $a$  sebesar 4,298, artinya apabila tidak ada perubahan pada program pembangunan daerah dan comdev UPPKS maka kemiskinan di Kecamatan Ngoro akan tetap konstan sebesar 4,298.

Koefisien regresi untuk  $X_1$  sebesar  $b_1 = 0,33$ , artinya setiap peningkatan kegiatan pembangunan daerah ( $X_1$ ) akan berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang sebesar 0,33 satuan.

Koefisien regresi untuk  $X_2$  sebesar  $b_2 = 0,37$ , artinya setiap peningkatan kegiatan Comdev UPPKS ( $X_2$ ) akan berpengaruh terhadap kemiskinan di kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang sebesar 0,37 satuan. Dengan peningkatan UPPKS pada kelompok PKK sebagai program yang berupaya untuk membantu keluarga miskin dalam mengembangkan kegiatan kewirausahaan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dukungan yang diberikan diantaranya adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, dengan pemberian modal melalui simpan pinjam modal.

## PEMBAHASAN

Dalam rangka pelaksanaan penanganan kemiskinan, lebih menekankan pendekatan kesejahteraan yang menempatkan manusia sebagai subyek dalam sebuah model yang disebut "*People Centered*" sehingga sumber daya manusia menjadi lebih berdaya. Secara umum program pengentasan kemiskinan meliputi:

1. Pemberdayaan Manusia. Tujuannya adalah peningkatan SDM yang berorientasi pada:
  - a. Peningkatan keterampilan teknis dan manajerial guna mendukung penciptaan peluang usaha baru dan pengembangan usaha yang sudah ada.
  - b. Peningkatan mutu kehidupan keluarga miskin melalui perbaikan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan.
  - c. Ruang lingkup kegiatannya meliputi penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan partisipasi masyarakat yang terorganisir berdasarkan keswadayaan bersama (gotong royong).
2. Pemberdayaan usaha. Dengan tujuan utama pengembangan usaha ekonomi produktif dan peningkatan pendapatan kelompok miskin. Ruang lingkup kegiatannya meliputi pemberian pelayanan keuangan melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa/Kelurahan, pengembangan permodalan usaha mikro, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis para pengusaha kecil, pengembangan kemampuan pemasaran produk, pembentukan jaringan kerja antar lembaga sosial ekonomi masyarakat, serta peningkatan hubungan antara usaha ekonomi masyarakat dengan lembaga keuangan dan permodalan.
3. Identifikasi Pemberdayaan Lingkungan. Komponen ini meliputi kegiatan kebutuhan sarana/prasarana pendukung sosial ekonomi, kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin (RTM) di bidang pendidikan, kesehatan dan fisik lingkungan, pembuatan rencana teknis pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan. Pemberdayaan lingkungan juga mencakup pengembangan sistem pemeliharaan sarana/prasarana secara mandiri oleh masyarakat sehingga dapat kelestarian manfaatnya. Selain itu di kembangkan pula konsep "Kader Pelestarian" lingkungan, yang akan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun dan memelihara prasarana lingkungan secara mandiri dan berkesinambungan.
4. Manajemen pendampingan, monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini meliputi penyusunan instrumen fasilitas pendampingan, pembimbingan langsung oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), kegiatan pemantauan, pengukuran kinerja dan evaluasi pelaksanaan program secara keseluruhan.

### Mekanisme Pengelolaan Program

Mekanisme pengelolaan pengentasan kemiskinan meliputi beberapa tahapan sosialisasi, perencanaan, pencairan dana, pelaksanaan, pengendalian serta pertanggungjawaban dan pelestarian.

1. Sosialisasi  
Sosialisasi merupakan tahapan penting dalam mendukung keberhasilan proses dan kegiatan program secara keseluruhan. Sosialisasi harus dimanfaatkan oleh semua pelaku program di semua tingkatan dan pada setiap saat atau kesempatan, guna mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak sehingga dapat mencapai hasil maksimal. Sosialisasi dapat dilakukan secara formal maupun informal melalui pertemuan-pertemuan di tingkat dusun/ kelompok/ lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan, musyawarah desa (musdes), melalui media cetak, elektronik dan lain-lain sesuai kondisi lokal.
2. Perencanaan  
Perencanaan merupakan tahapan kegiatan setelah sosialisasi program yang dilakukan dengan tujuan menyusun usulan kegiatan secara partisipatif, membahas usulan, dan menetapkan alokasi anggaran. Rangkaian kegiatan perencanaan meliputi: pra-perencanaan; musdes perencanaan; penelitian usulan Desa/Kelurahan; Rakor KPK Kabupaten; dan Rakor KPK Propinsi.
3. Pencairan dana

Tahap akhir dari pengentasan kemiskinan adalah pencairan dana. Dalam proses tersebut, perlu adanya peranan dari berbagai pihak, agar tidak terjadi penyelewengan dan juga sebagai evaluasi atas pelaksanaan program yang ada.

Dari hasil penelitian di atas di dapat bahwa Comdev UPPKS ( $X_2$ ) akan berpengaruh terhadap kemiskinan di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang sebesar 0,37 satuan yang tergolong berpengaruh rendah, dan uji t pada hipotesis yang menolak adanya hubungan Comdev UPPKS terhadap kemiskinan ini disebabkan karena kendala-kendala dalam pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kecamatan Ngoro, di antaranya:

1. Aspek Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan
  - a) Masih minimnya pembinaan kepada pengurus maupun anggota kelompok UPPKS yang disebabkan karena jarak yang terlalu jauh, waktu yang kurang tepat, dan kepentingan-kepentingan lainnya.
  - b) Pengelolaan administrasi dan keuangan kelompok yang belum terkelola dengan baik.
  - c) Rendahnya wawasan dan pengetahuan dalam bidang pemasaran dan peningkatan daya saing produk.
2. Aspek Penerapan Gaya Kepemimpinan
  - a) Adanya anggota kelompok yang tidak membayar angsuran modal, akan berdampak pada perputaran modal yang berkurang dan kecemburuan dari anggota lain yang setiap bulan mengangsur pinjaman modal yang diterimanya.
  - b) Masih kurangnya jumlah pendamping kelompok UPPKS dalam mengembangkan usaha.
3. Aspek Pemberian Bantuan Modal dan Minimnya Bantuan ATTG (Alat Teknologi Tepat Guna) yang diterima.

Walaupun kontribusi kelompok UPPKS sebagai upaya pencapaian pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jombang belum tercapai atau terlaksana dengan baik, sejauh ini masih hanya memberikan dampak ekonomi pada peningkatan pendapatan masyarakat, dampak sosial lingkungan sekitar dan dampak bagi pengembangan usaha yang sedang dikembangkan. Sedangkan untuk kontribusi secara keseluruhan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Jombang, namun memberikan pengaruh terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Kabupaten Jombang.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Bahwa ada pengaruh signifikan pada pembangunan daerah terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
2. Bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan Comdev UPPKS terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Tidak adanya pengaruh program Comdev UPPKS di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang adalah disebabkan oleh aspek peningkatan wawasan dan pengetahuan; aspek penerapan gaya kepemimpinan serta aspek pemberian bantuan modal dan minimnya bantuan ATTG (Alat Teknologi Tepat Guna) yang diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M & Firmansyah, A. 2012. Critical Appraisal on Journal of Clinical Trial. The Indonesian Journal Medicine, 4(44): 337-343.
- Ade Ermasari, 2009, Dinamika Kemiskinan Di Jawa-Madura Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2002-2007, Majalah Geografi Indonesia, UGM, Yogyakarta
- Adrian, Payne, 1993, The Essence of Services Marketing (Pemasaran Jasa), Andy, Yogyakarta.
- Agus Triyono, 2014, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Development Program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) PT. Holcim Indonesia Tbk Pabrik Cilacap, KomuniTi, Vol. VI, No. 2 September 2014, Universitas Muhammadiyah Solo
- Ala, Andre B. 1981. Strategi Anti Kemiskinan Lima Tahap. Analisa Tahun X, No. 9, September 1981
- Alfian, Mely G. Tan, Selo Soemardjan. 1980. Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Ilmu Persada
- Amalia, Wia Rizqi., Wahyudin Nor dan M. Nurdiansyah, 2014, Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (2009 – 2013)
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, (2016) Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. I, No. 4, Hal 9-14, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

- Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie (2017), Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
- Friedman, J. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell.
- Ife, Jim. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irawan dan Suparmoko. 2007. *Ekonomika Pembangunan, Edisi Kelima*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Yogyakarta: UGM
- Kenny, Susan, 1998. *Developing Communities for The Future*. Melbourne: An International Thomson Publishing Company
- Khodijah Mustaqimah, Sri Hartoyo, Idqan Fahmi, Peran Belanja Modal Pemerintah dan Investasi Pembangunan Manusia dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, hlm. 1-15 Vol 6 No 2, Edisi Desember 2017, FEM IPB.
- M Chairul Basrun Umanailo 2019, *Integration of Community Empowerment Models [Pengintegrasian Model Pemberdayaan Masyarakat]*, *Proceeding of Community Development is Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*. Relawan Jurnal Indonesia, Universitas Sampoerna
- Malcom Payne and Gurid Aga Askeland, *Globalization and Int'l. Social Work: Postmodern Change and Challenge*, Ashgate, Burlington, VT., USA, 2008
- Malcom Payne, *Modern Social Work Theory*, 3th ed., Palgrave, Macmillan, NY., USA, 2005
- Malvin Delgado, *Community Social Work Practice in an Urban Context: The Potential of a Capacity-Enhancement Perspective*, Oxford University Press Inc, NY., USA, p.5.
- McIver, J.P. & Carminer, E.G. (1994). *Unidimensional Scaling*. In Michael Lewis-Beck. (Eds.). *International Hand Book of Quantitative Application in the Social Sciences (Volume 4: Basic Measurement)*. London: Sage Publication.
- Messick, S. (1995). *Validity of Psychological Assessment, Validation of Inferences from Persons Respond and Performance as Scientific Inquiry into Score Meaning*. *American Psychologist*, 741–749
- Muhammad Awaluddin Ardiansyah, Andi Djemma, Fajra Octrina (2017): *The Impact of Community Based Environmental Planning (Plbk) Supported by National Program for Community Empowerment (Pnmp) Over Society's Behaviour and Welfare Tier*, *European Journal of Research and Reflection in Management Sciences* Vol. 5 No. 4, 2017
- Munir. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi*. NTB, Bappeda
- Neny Susanti (2017), *Pengembangan Community Based Economic Development Sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 (Studi Deskriptif Pada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)*. *Jurnal, Jurnal FISan* Vol. 3 No.2 2017, Universitas Airlangga Surabaya
- Nugroho, Iwan (2004), *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan/ Iwan Nugroho, Rochmin Dahuri*, Jakarta: LP3ES, 2004
- Priyono & Marnis (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher
- Salim, Emil, 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES
- Siagian, Sondang P. 2004. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sirojuzilam dan Mahalli, K. 2010. *Regional. Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*. USU Press. Medan
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta: Kanisius
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Pratama
- Sullivan, J.L., & Feldman, S. (1994). *Multiple Indicators: An Introduction*. In Michael Lewis-Beck. (Eds.). *International Hand Book of Quantitative Application in the Social Sciences (Volume 4: Basic Measurement)*. London: Sage Publication
- Sumantri (2000). *Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Fakultas Psikologi Unpad
- Sumarsono S. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta (ID): Graha Ilmu
- Sumodiningrat, Gunawan. *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004
- Syamsul Hadi dan Arief Noor Akhmadi (2018) *Institutional Role of Local Economic Development in Village Isolated Jember*, *Jurnal Agritop*, Universitas Muhammadiyah Jember
- Tikson, T. Deddy. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Makassar: Gemilang Persada
- Todaro MP, Smith SC. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta (ID): Erlangga.
- Todaro, Michael, 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka.